

BAB IV

KESIMPULAN

Skripsi ini menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam mempersiapkan profesi insinyur dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Didalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terdapat aliran bebas di delapan bidang profesi salah satunya adalah profesi insinyur. Dengan adanya liberalisasi pasar di bidang insinyur akan membuka pergerakan insinyur di antara negara – negara anggota ASEAN. Di Indonesia sendiri pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tenaga insinyur. Pergerakan insinyur diatur didalam MRA di bidang keinsinyuran yang telah disetujui oleh negara - negara anggota ASEAN. Didalam MRA juga dijelaskan mengenai persyaratan untuk menjadi Insinyur Profesional yaitu memiliki gelar ACPE sehingga dapat bekerja di negara – negara anggota ASEAN.

Dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam mempersiapkan profesi insinyur. Pemerintah Indonesia melakukan dua upaya dalam mempersiapkan profesi insinyur dalam era masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Upaya pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menetapkan badan sertifikasi nasional untuk melakukan sertifikasi kepada insinyur di Indonesia. Badan sertifikasi yang ditunjuk oleh Indonesia adalah LPJK dan BNSP.

LPJK melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi dan juga asosiasi perusahaan. Salah satunya adalah PII, PII selain bertugas untuk membantu para insinyur mendapatkan SKA juga melakukan Program Pembinaan Profesi Insinyur (PPPI) untuk mendorong insinyur untuk mengikuti sertifikasi insinyur profesional sebagai syarat untuk mendapatkan SKA, dan juga PII melaksanakan Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang digunakan untuk memperpanjang STRI yang hanya berlaku 5 tahun. LPJK mengeluarkan Sertifikat Keahlian (SKA) yang dapat diperoleh melalui asosiasi profesi yaitu PII. Sertifikat Keahlian (SKA) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ACPE. Indonesia juga menetapkan BNSP sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensi profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi sehingga insinyur yang telah kompeten di bidangnya mendapatkan pengakuan.

Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan lembaga pemberi sertifikasi keinsinyuran untuk melakukan sertifikasi dalam memperoleh gelar ACPE, namun masih terdapat kendala yaitu para sarjana teknik yang mengikuti sertifikasi memiliki kendala dalam mengikuti tes yang dalam bentuk bahasa inggris. Adanya RPJMN 2014 – 2019 yang membutuhkan banyak tenaga kerja insinyur juga membuat insinyur yang ada di Indonesia berpikir untuk mengisi peluang tersebut sehingga tidak membutuhkan gelar ACPE. Terdapat biaya yang besar untuk mengikuti sertifikasi dalam memperoleh gelar ACPE dan meskipun pemerintah telah menetapkan lembaga yang dapat melakukan sertifikasi,

namun lembaga belum memiliki assessor, asosiasi profesi, dan juga lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan sertifikasi pada profesi insinyur.

Upaya kedua yang dilakukan Indonesia adalah dengan mengeluarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2014 dan Undang – Undang No. 35 Tahun 2016. Didalam Undang – undang 11 Tahun 2014 dijelaskan mengenai insinyur dan hal – hal yang terkait dengan jasa keinsinyuran. Undang – undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadikan insinyur Indonesia yang berjaya, mandiri, memiliki daya saing global, dan agar insinyur Indonesia memiliki kompetensi yang baik. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan menteri No. 35 Tahun 2015 mengenai Program Studi Program Profesi Insinyur (PS-PPI). Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 melalui PS–PPI, Insinyur di Indonesia dipersiapkan agar memiliki kompetensi berupa sertifikasi dan pengakuan profesi insinyur sehingga dapat bersaing secara global. Program Studi Program Profesi Insinyur ini merupakan program yang wajib diikuti oleh sarjana teknik untuk mendapatkan gelar insinyur. Rimstekdikti mengandeng 40 Universtas untuk menjalankan PS –PPI salah satunya adalah ITB dan UNPAR.

ITB dan Unpar sebagai salah satunya universitas yang ditunjuk oleh Kementrian Riset Tekonologi dan Perguruan Tinggi melakukan berbagai persiapan dalam menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur. Rencananya kedua universitas ini akan membuka Program Studi Program Profesi Insinyur pada tahun ajaran 2017/2018 namun ITB sedang mengusahakan untuk membuka Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada

bulan januari 2017. Didalam program studi program profesi insinyur ini terdapat 24 SKS yang terdiri dari 70% praktik dan 30% magang. ITB dan Unpar akan bekerjasama dengan perusahaan – perusahaan untuk membantu mahasiswa dalam melakukan kerja praktik. Setelah mengikuti program studi program profesi insinyur dan dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi mahasiswa akan mendapatkan gelar insinyur.

Pemerintah memang telah mengeluarkan undang – undang No. 11 Tahun 2014 dan juga peraturan menteri No. 35 Tahun 2016 untuk pelaksanaannya dalam mempersiapkan profesi insinyur menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga insinyur Indonesia mendapat gelar sebagai ACPE dan dapat bersaing didalam era MEA 2015. Upaya pemerintah Indonesia sudah cukup baik namun akan lebih baik lagi jika pemerintah Indonesia terus mendorong 40 universitas yang telah terpilih untuk segera menyelenggarakan program studi program profesi insinyur, karena sampai saat ini program studi program profesi insinyur belum diselenggarakan oleh perguruan tinggi seperti di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Katolik Parahyangan. Padahal rencananya program studi program profesi insinyur diselenggarakan pada tahun ajaran 2016/2017. Sampai saat ini perguruan tinggi masih merencanakan untuk melaksanakan program studi program profesi insinyur di tahun ajaran 2017/2018.

LAMPIRAN

A. Brosur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 Pasal 25 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tersebut diatas diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur ketentuan tentang pembentukan, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga yang diubah mejadi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat regional, independen, mandiri dan terbuka yang dalam legalitasnya bersifat nirlaba.

(2) Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional diukuhkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi dan kepengurusan lembaga tingkat provinsi diukuhkan oleh Gubernur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga diatur dalam peraturan Menteri.

4. Dalam menjalankan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PR/MT/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PR/MT/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PR/MT/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Setelah melalui proses pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PR/MT/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PR/MT/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015, yang menetapkan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015 yang terdiri atas wakil-wakil kelompok usaha, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pakar/pejabat/tingkat/dan pemerintah yang telah diukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Tri Widianto J
Merangkap anggota	
Wakil Ketua I	: Putu Marhayudi
Merangkap anggota	
Wakil Ketua II	: Wisman Wangsahala
Merangkap anggota	
Wakil Ketua III	: Sawono Hardjopradj
Merangkap anggota	
Anggota	: Bambang Kusumajadi
	: Dama Tjuna Saptolewo
	: Harry Purwanara
	: I Gde Widayana Merati
	: Jimmy S Juwana
	: Krishna Suryanto Prabadi
	: Nycto Suwignyo
	: Ruslan Rizki
	: Yeye Supriyana S

Terdapat penambahan Pengurus baru yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 yang susunannya adalah sebagai berikut:

Ketua Harian merangkap anggota	: Rendy Lumendjito
Wakil Ketua I merangkap anggota	: Bachfar Ravenala Ujung
Wakil Ketua II merangkap anggota	: S Polak H Simalupang
Wakil Ketua III merangkap anggota	: Djoko Wahyu Kurniaji
Anggota	: Tumpas S Sampar
	: Anggoro S
	: Marina Indriyani
	: H Prikly Shalehudin
	: Erie Haryadi
	: Vini Sencopel
	: Mohammad Singh
	: Didi Haryadi
	: Zulhadi Hadi
	: Bachfar Sirajuddin
	: Anotik T Pabbaban
	: Nala Muband
	: Joni Piki Palandung
	: Omi Samudriawan
	: Hari Peranto
	: Teddy Caster Santuti
	: Muchtar Aziz
	: Elandi Sanjar
	: Menurus Restanto
	: Annu Baihi
	: Robertus Satri
	: Haidar A. Yasin
	: Iwan Gunawan
	: Andre A Y Schwin
	: Manahara R. Sahaan
	: Hery Sukanto



LPJKN



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
(National Construction Services Development Board)

Gedung Batai Krida
Jl. Iskandarsyah Raya No. 85
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. +62-21-7201476 Fax. +62-21-7201472
<http://www.lpjkn.net>

B. Brosur Badan Nasional Sertifikasi Profesi

BERDIRINYA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)

Berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1999, 8 (delapan) asosiasi profesional, 16 (enam belas) insani profesi serta beberapa wakil pemerintah, pakar dan perguruan tinggi melaksanakan pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada tanggal 9 Agustus 1999. Keputusan pembentukan lembaga ini berdasarkan pada hasil konsensus nasional yang di fasilitasi oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Perjalanan Kepegunungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)

Periode Kepegunungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sejak di Undang-Undang 18 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

KEPEGUNGAN PERTAMA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - NASIONAL PERIODE: 1999 - 2003

Kelas	: Agus G Kartasasmita
Ketua Bidang Umum	: A. Maelis Adia
Ketua Bidang Lingkungan Usaha	: Sunana S Djahika
Ketua Bidang Profesi	: Sutawidj Sidiarta Mijap
Ketua Bidang Perumahan	: Sampurna Sitipu
Sekretaris Umum	: Moch Charmin
Sekretaris Bidang	: Annan Nur
Lrg/Lingkungan	: Chaidir A Makarim
Sekretaris Bidang Profesi	: Idianto Dary
Sekretaris Bidang Perumahan	: Idianto Dary

KEPEGUNGAN KEDUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL PERIODE: 2003 - 2007

Ketua Umum	: Sulitjip Sidiarta Mulyo
Ketua Bidang Umum	: A. Sutjipto
Ketua Bidang Lingkungan Usaha	: Agus G Kartasasmita
Ketua Bidang Profesi	: Gandhi Harapip
Ketua Bidang Perumahan	: Sunana S Djahika
Sekretaris Umum	: Kristiya Kartika
Sekretaris I	: Chaidir A Makarim
Sekretaris II	: Idianto Dary

KEPEGUNGAN KETIGA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL PERIODE 2007 - 2011

Kepegunungan LPJK Periode ini berdasarkan hasil MUNAS pada tanggal 31 Juli - 11 Agustus 2007 sebagai berikut:

Ketua Umum	: H. M. Mulkhan Amin
Ketua Bidang Bidang	: M. H. M. Mulkhan Amin
Ketua Bidang Lingkungan Usaha	: Samudra Handjomojaja
Ketua Bidang Profesi	: Agus Hidayat
Ketua Bidang Perumahan	: Bachtiar Ravelesia Ujung
Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan	: Poemomo Soekarno
Sekretaris Umum	: Deden Kriandandar
Sekretaris I	: Ahmad Sunaji
Sekretaris II	: Dharma Saputra Pohan
Anggota	: Bachtiar Sunjodin
	: Dharma Tyanto Saptoedwo
	: Omar Samudra Iwan
	: Wayan Denasa
	: Syahid Junardono
	: Jimmy Sirewito Juwana
	: Janggun Rastrow
	: Anisat Tatang
	: Bambang Soemardono
	: H. M. Mulkhan

Perubahan Kepegunungan:

1. Pengunduran diri anggota pengurus (Bambang Widianta) kemudian diganti oleh Elend Sanjip melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu.
2. Pengunduran diri Ketua Bidang Registrasi (Agus Raharjo) yang kemudian digantikan oleh (Kak G. Patestasimo).
3. Pengunduran diri Sekretaris Umum (Dadan Kriandandar) untuk menjadi Anggota Dewan Pengurus (LPJKN), kemudian digantikan oleh (A. Sunjadin, Nono) berdasarkan hasil rapat kelompok unsur pemerintah.
4. Pengangkatan Pelaksana Harian (PH) Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Anisat Tatang) untuk mengisi jabatan Ketua Bidang Dilat yang sebelumnya dijabat Poemomo Soekarno.

KEPEGUNGAN KEEMPAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL PERIODE: 2011 - 2015

Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Pasal 31 ayat (3) tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri yang sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beranggotakan wakil-wakil dari:
 - Asosiasi perusahaan jasa konstruksi,
 - Asosiasi profesi/jasa konstruksi
 - Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan
 - Instansi pemerintah yang terkait.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur lembaga tersebut sebagai berikut:
 - Pasal 25
 - (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri dan terbuka yang dalam kegiatannya bermitra.
 - (2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh negara bukan oleh organisasi apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24.
 - (3) Masa bakti minimum tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran internal lembaga Lembaga.

Langkah-langkah mengembangkan LSP

1. Mengembangkan komitmen pemangku kepentingan
 - a) Identifikasi acuan normatif pengembangan LSP yakni Pedoman BNSP dan regulasi teknis pada bidang substantifnya.
 - b) Lakukan apresiasi/soalisasi untuk memastikan komitmen para pemangku kepentingan untuk membentuk LSP.
 - c) Untuk LSP P3, bentuk Panitia kerja pembentukan LSP dan kembangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai Pedoman BNSP 2002.
 - d) Kembangkan organisasi yang mencakupi pengarah, dan pelaksana (Bepda, bagian administrasi, bidang standarisasi, bidang sertifikasi, bidang manajemen mutu dan komite skema).
 - e) Pastikan dokumentasi pembentukan adalah sah: untuk LSP Pihak 3 disediakan oleh notaris, sedangkan untuk LSP Pihak 1 dan Pihak 2 berupa surat keputusan pimpinan puncak organisasi.
 - f) Untuk LSP Pihak 3, pastikan dukungan kuat dari industri/pengguna, asosiasi profesi dan otoritas kompeten.
2. Mengembangkan sistem manajemen LSP yang terdokumentasi:
 - a) Bentuk tim pengembangan sistem manajemen LSP.
 - b) Lathim tim untuk penerapan dan dokumentasi manajemen LSP, auditor LSP pengembangan skema sertifikasi, serta pelatihan asesor kompetensi sesuai dengan rencana ruang lingkup.
 - c) Kembangkan dan tetapkan ruang lingkup sertifikasi (sesuai standar kompetensi yang tercapai) dan skema sertifikasi.
 - d) Lakukan pengembangan sistem manajemen mutu dan dokumentasinya (Panduan Mutu, SOP, Formulir dan dokumen pendukung lainnya).
 - e) Lakukan pengembangan skema sertifikasi.
 - f) Lakukan pengembangan rencana dan pengorganisasian asesmen dan perangkat asesmen sesuai ruang lingkup.
 - g) Lakukan pra-validasi untuk memastikan kesesuaian dokumen sistem manajemen mutu terhadap pedoman BNSP dan regulasi teknis.

Kerangka Program Menyiapkan Lisensi LSP

3. Mengendalikan dan meningkatkan secara berkelanjutan LSP:
 - a) Lakukan audit internal secara periodik terhadap LSP.
 - b) Lakukan kaji ulang secara periodik.
 - c) Lakukan pengembangan produk/jasa skema sertifikasi berlanjut.
4. Terapkan sistem manajemen mutu kepada seluruh personel LSP.
5. Lakukan validasi untuk memastikan kesesuaian dokumen sistem manajemen mutu terhadap pedoman BNSP, regulasi teknis, dan kesesuaian pelaksanaan, dan ajukan lisensi kepada BNSP.

BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jl. MT. Haryono Kav. 52
Jakarta Selatan 12760
Telp. 021-7992285 Fax. 021-7992321
E-mail: info@bnsp.go.id
www.bnspp.go.id

Mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi

C. Informasi Pengisian Aplikasi ACPE

INFORMASI PENGISIAN APLIKASI ACPE, APP 01 APP 01

APPLICATION FOR A PROFESSIONAL ENGINEER TO BE REGISTERED AS ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ENGINEER (ACPE)

(To be completed by Applicant in BLOCK LETTERS)

Name : Nama lengkap

Name to be put in certificate: Nama yang akan dicantumkan pada sertifikat ACPE

Address : Alamat lengkap sesuai KTP dilengkapi dengan kode pos

Tel. No.: telepon genggam / rumah Fax No.: pribadi &/ kantor

E-mail: Wajib diisi dengan jelas

Identity Card No.: Date of Birth:

First Degree / University: data pendidikan Strata 1 saja,
pendidikan lebih lanjut cukup
dilampirkan fotokopi ijazahnya

Discipline of Engineering:

Graduate Engineer Registration No.:

Date of Registrations:

Professional Engineer Registration No.: Nomor Registrasi SKA (nomor yang berada di dalam kotak, cukup salah satu saja)

Date of Registrations: Tanggal penetapan SKA

Branch of Engineering: Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai SKA dalam Bahasa Indonesia
(salah satu saja, lainnya cukup dilampirkan fotokopinya saja)

Discipline for ACPE Registration (*select 1 discipline only*):

<input type="checkbox"/> Mechanical	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Chemical	<input type="checkbox"/> Physic
<input type="checkbox"/> Aeronautical	<input type="checkbox"/> Marine Tech	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Environmental
<input type="checkbox"/> Petroleum	<input type="checkbox"/> Mining	<input type="checkbox"/> Geodetic	
<input type="checkbox"/> Civil			
<input type="checkbox"/> Structural	<input type="checkbox"/> Geotechnical	<input type="checkbox"/> Water Resources	<input type="checkbox"/> Transportation

I enclose herewith * ~~money order / bank draft / cheque no.~~ for the amount of Rp. being the fee.

Date of previous application: NIL (untuk pendaftaran perdana)
(Write NIL if not applicable)

Date: Tanggal pengisian aplikasi SIGN HERE

(.....)
(signature)

*delete whichever is not applicable

D. Deklarasi bagi Pendaftar ACPE

APP 03

DECLARATION FOR THE APPLICATION AS ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ENGINEER

I hereby declare that:

Total pengalaman kerja (tahun)
setelah kelulusan S1

I have had _____ years of practical experience in engineering.

	YES	NO
I am a Professional Engineer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I meet the entire requirement as stated in Article 3 of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No disciplinary action have been taken against me	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I am not a bankrupt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Others: Silakan cantumkan antara lain keanggotaan / jabatan Anda dalam organisasi profesi lainnya, dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Yours Sincerely,

SIGN HERE

(signature)

Name: _____

PE Reg. No.: Nomor registrasi SKADate: Tanggal pengisian aplikasi

Note: Please tick (✓) in the relevant box.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Balassa, Bela. *“The Theory of Economic Integration”*. (Oxon:2011).

Bustami, Gusmardi. *“Menuju ASEAN Economic Community 2015”*, (Departemen perdagangan Republik Indonesia).

Eisner, Marc Allen. Jeff Worsham, dan Evan J Ringquist. *“Contemporary Regulatory Policy”*. (Lynne Rienner Publisher:2009).

Hidayati, Ratnaningsih. *“ASEAN Satu Komunitas Satu Identitas”*, (Deepublish: 2015).

Jackson, Robert dan Georg Sorensen, *“Introduction International Relations Theories & Approaches”*, (Oxford: 2010).

Jusoh, Sufian. Pierre Sauve, Yahaya Ramli, dan Shamsul Izhan Abdul Majid, *“Handbook on Liberalisation of Professional Services Through Mutual Recognition in ASEAN : Engineering Services”*, (The Asean Secretariat: 2015).

“Kesiapan Konstruksi Jasa Konstruksi Nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”, (Kementrian Perdagangan: 2015).

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi, *“International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism 2nd edition”*, (Columbia,1993).

Majalah

Amri, Iwan Suyudhie. “*Masyarakat ASEAN*”, Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%207%202015.pdf>.

“*Majalah Masyarakat ASEAN Edisi 7: Membidik Peluang MEA*”, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%207%202015.pdf>.

Razak, Ir Habibie. “*Insinyur Menghadapi MEA*”, diakses dari <http://pii.or.id/wp-content/uploads/EW-2.pdf>.

ARTIKEL

“*APEC Engineer Register Indonesia Assessment Statement*”, Persatuan Insinyur Indonesia, diakses dari http://www.ieagreements.org/APEC/Documents/PII_Assess_State.pdf.

“ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services Kuala Lumpur, 9 December 2005”, Association of Southeast Asian nation, diakses dari http://asean.org/?static_post=asean-mutual-recognition-arrangement-on-engineering-services-kuala-lumpur-9-december-2005-2

Asmardika, Rahman. *“8 Agustus 1967 : ASEAN Dideklarasikan di Bangkok”*, Okezone, diakses dari http://news.okezone.com/read/2015/08/07/18/1192558/8-agustus-1967-asean-dideklarasikan-di-bangkok_

Bata, Anselmus. *“Ini Pidato Jokowi pada Peringatan HUT RI ke – 71 RI di Sidang DPR dan DPD”*, diakses dari <http://www.beritasatu.com/politik/380026-ini-pidato-jokowi-pada-peringatan-hut-ke71-ri-di-sidang-dpr-dan-dpd.html>.

”Berita Kegiatan : Program Pembinaan Profesi Insinyur di Universitas Islam Indonesia”, Persatuan Insinyur Indonesia, diakses dari https://pii.or.id/berita-kegiatan-program-pembinaan-profesi-insinyur-di-universitas-islam-indonesia_.

“Butuh 1,5 Insinyur untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, RimaNews, diakses dari <http://rimanews.com/ekonomi/investasi/read/20160726/294422/Butuh-1-5-Insinyur-untuk-Mendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia>.

“Dampak Pembangunan Infrastruktur Mulai Terasa”, diakses dari <http://www.presidentri.go.id/infrastruktur/dampak-pembangunan-infrastruktur-mulai-terasa.html>.

“Dibanding Jumlah Penduduk, Insinyur Tersertifikasi ACPE di Indonesia Masih Kurang”, Pusat Komunikasi Publik, diakses dari <https://www.pu.go.id/m/main/view/10032>.

Direktur Program KPPIP, *“Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia”*, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas”, diakses dari <file:///Users/tifannyclara/Downloads/20160126-undip-presentation-framework-pembangunan-infrastruktur-indonesia-final.pdf>.

Fariyadin, Adiman. *“Membangun Kejayaan Insinyur Indonesia”*, Bengawanpost, diakses dari <http://www.bengawanpost.com/membangun-kejayaan-insinyur-indonesia/>.

“Perdagangan Bebas ASEAN Menjadi Peluang Insinyur Indonesia”, 2016, diakses dari <http://pu.go.id/berita/11201/Perdagangan-Bebas-ASEAN-Menjadi-Peluang-Insinyur-Indonesia>.

“Perkuat Identitas Keinsinyuran dengan P3I”, Harian Analisa, diakses dari <http://harian.analisadaily.com/kota/news/perkuat-identitas-keinsinyuran-melalui-p3i/230830/2016/04/18>.

“Hadapi MEA Indonesia Harus Siapkan 15 juta Insinyur”, <http://infobanknews.com/hadapi-mea-indonesia-harus-siapkan-15-juta-insinyur/>.

“History”, Association of Southeast Asian Nation, diakses dari <http://asean.org/asean/about-asean/overview/>.

Humas, “*Sudah Punya 700 ribu, Indonesia Masih Butuh 120 ribu*”, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses dari <http://setkab.go.id/sudah-punya-700-ribu-indonesia-masih-butuh-120-ribu-insinyur/>.

“*Informasi Pengisian Aplikasi ACPE*”, Persatuan Insinyur Indonesia <http://pii.or.id/wp-content/uploads/Info-Aplikasi-ACPE-2013.pdf>.

Intan Sari, Novita. “*PII: Minat Anak Muda Indonesia Jadi Insinyur Turun, 2015*”, diakses dari <http://www.merdeka.com/uang/pii-minat-anak-muda-indonesia-jadi-insinyur-turun.html>.

Iradhati Wurinanda, “*40 Perguruan Tinggi Gelar Program Profesi Insinyur*”, diakses dari <http://news.okezone.com/read/2016/04/13/65/1361710/40-perguruan-tinggi-gelar-program-profesi-insinyur>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/upaya>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/sertifikasi>.

Kurniawan, Sigit. “*Sibuk Membangun Infrastruktur, Indonesia Malah Kekurangan Insinyur*”, diakses dari <http://marketeters.com/sibuk-bangun-infrastruktur-indonesia-malah-kekurangan-insinyur/>.

“*Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*”, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx).

Nawawi, M. Bahrin, “*Jasa Konstruksi, antara Pasal 4(2) dan Pasal 23 UU PPH*”, *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan*”, diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19556-jasa-konstruksi,-antara-pasal-4-2-dan-pasal-23-uu-pph>.

Oerip, Istanto “*MEA dan Insinyur*”, diakses dari <https://pii.or.id/mea-dan-insinyur>.

“*Overview*”, Association of Southeast Asian Nation, diakses dari <http://asean.org/asean/about-asean/overview/>.

“*Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*”, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Pembentukan-Masyarakat-ASEAN-2015.aspx>.

“*Pemerintah Dorong Insinyur Indonesia Tingkatkan Daya Saing Industri*”, Kompas, diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/12/051500526/pemerintah.dorong.insinyur.indonesia.tingkatkan.dayasaing.industri>.

“*Pendidikan Teknik & Profesi Insinyur*”, Persatuan Insinyur Indonesia, diakses dari <http://pii.or.id/wp-content/uploads/EW-3.pdf>.

“*Peran Konsultan Indonesia Penting tuk Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*”, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, diakses dari <http://bpkonstruksi.pu.go.id/berita.php?halaman=detail&kode=930>.

“Perkuat Identitas Keinsinyuran melalui P3I”, diakses melalui <http://harian.analisadaily.com/kota/news/perkuat-identitas-keinsinyuran-melalui-p3i/230830/2016/04/18>.

Razak, Habibie, *“Pengenalan Sertifikasi AE dan ACPE pada P3I di Makassar 21-22 November 2015”*, diakses dari <http://habibierazak.com/2015/11/pengenalan-sertifikasi-asean-engineer-ae-dan-asean-chartered-professional-engineer-acpe-pada-program-pembinaan-profesi-insinyur-p3i-di-makassar-21-22-november-2015/>.

Rombe baan, Marcel. *“Indonesia Masih Kekurangan 1.5 juta Insinyur”*, NetralNews, diakses dari <http://www.netralnews.com/news/kesra/read/16255/indonesia.masih.kekurangan.15.juta.orang.insinyur>.

“Sarjana Teknik Belum Tentu Insinyur”, diakses dari <http://s1ee.del.ac.id/?m=2014>.

“Sejarah Berdirinya ASEAN dan tujuannya”, Sejarah Indonesia, diakses dari <http://www.sejarah-negara.com/sejarah-berdirinya-asean-dan-tujuannya/>.

“Sejarah BNSP”, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diakses dari http://www.bnsp.go.id/profile/index/1/sejarah_berdiri_bnsp.html.

“Sertifikasi”, Persatuan Insinyur Indonesia diakses dari <http://pii.or.id/syarat-sertifikasi>.

Suroso, G.T. *“Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi”*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kementerian Keuangan, diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20517-infrastruktur-dan-pembangunan-ekonomi>.

Syaputri, Ella. “*MEA tawarkan 14 juta lapangan kerja baru*”, Antaranews, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/450113/mea-tawarkan-14-juta-lapangan-kerja-baru>.

“*Penghargaan Distinguished Honorary Fellowship of CAFEO untuk Menteri SDM*”, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses dari <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6579-tahun-2018-puncak-produksi-gas-indonesia.html>.

Teowira, Steffi. “*8 Profesi yang akan bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*”, Rappler, diakses dari <http://www.rappler.com/indonesia/117439-8-profesi-masyarakat-ekonomi-asean-mea>.

“*The Founding of ASEAN*”, Association of Southeast Asian Nation, diakses dari <http://asean.org/asean/about-asean/history/>.

Tjokronegoro DEA, IPM, Prof. Dr. Ir. Harijono A. “*Pembangunan Insinyur Indonesia*”, diakses dari <http://pii.or.id/wp-content/uploads/EW-3.pdf>.

“*What is AFEO?*”, ASEAN Federation Engineering Organisations, diakses dari <http://afeo.org/>.

Wiranto, “*Indonesia Butuh 1,5 juta Insinyur*”, diakses dari <http://beritaku.co.id/berita-indonesia-butuh-15-juta-insinyur.html>.

“*Wujud Sinergi PII Kalimantan Timur dan Ikatek Unhas melalui PPPI Balikpapan*”, Ikateknikunhas, diakses dari

<http://ikateknikunhas.org/2016/05/wujud-sinergi-pii-kalimantan-timur-dan-ikatek-unhas-melalui-pppi-balikpapan-21-mei-2016/>.

JURNAL

“Analisa Kesiapan Pasar Kerja Indonesia dalam Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” (Unpublish Paper).

Direktur Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, KEMENDAG, *“Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Meningkatkan Daya Saing, Meraih Peluang”*, (KEMENDAG: 2015), diakses dari <http://isd-indonesia.org/wp-content/uploads/2015/09/Indonesia-Services-Dialogue-Meningkatkan-Daya-Saing-Meraih-Peluang.pdf>.

“Kabupaten Malang Menuju MEA 2015”, diakses dari http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156432-%5B_Konten_%5D-Konten%20D768.pdf.

“Kesiapan Konsultan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”, Pusat komunikasi Publik, diakses dari http://pu.go.id/main/view_pdf/9829.

Keliat, Makmur. Ph.D Asra Virgianita, MA Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D Agus Catur Aryanto Putro, S.Sos. *“Pemetaan pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN”*, Kementrian Luar Negeri Indonesia, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Documents/Penelitian%20BPPK%202014/Laporan%20Akhir%20Liberalisasi%20Jasa.pdf>.

“*Pengaturan Kesepakatan Perdagangan Bebas Regional dalam Kerangka WTO*”, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29019/3/Chapter%20II.pdf>.

“*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi*”, diakses dari [file:///Users/tifannyclara/Downloads/Peraturan-Pemerintah-tahun-2004-023-04%20\(3\).pdf](file:///Users/tifannyclara/Downloads/Peraturan-Pemerintah-tahun-2004-023-04%20(3).pdf).

“*Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur*”, diakses dari [file:///Users/tifannyclara/Downloads/PERMEN%20NOMOR%2035%20TAHUN%202016%20TENTANG%20PROGRAM%20PROFESI%20INSINYUR%20-%20FINAL%20-%20SALINAN%20\(2\).pdf](file:///Users/tifannyclara/Downloads/PERMEN%20NOMOR%2035%20TAHUN%202016%20TENTANG%20PROGRAM%20PROFESI%20INSINYUR%20-%20FINAL%20-%20SALINAN%20(2).pdf).

“*Program Profesi Keinsinyuran mulai 2017*”, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, diakses dari <http://www.kopertis12.or.id/2016/04/14/program-profesi-keinsinyuran-mulai-2017.html>.

Rahman, M. Ari Salsabilah. “*Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*”, diakses dari [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/10.M.Ari%20Sabilah%20R%20\(04-27-15-03-10-08\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/10.M.Ari%20Sabilah%20R%20(04-27-15-03-10-08).pdf).

“*Sertifikasi*”, diakses dari <http://pii.or.id/syarat-sertifikasi>.

“Targetkan Luluskan 300 Peserta Program Profesi Insinyur”, Jawapos.com, diakses dari <http://www.jawapos.com/read/2016/07/25/41211/target-loloskan-300-peserta-program-profesi-insinyur>.

“Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Program Profesi Insinyur”, diakses dari <http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/PERMEN-NOMOR-35-TAHUN-2016-TENTANG-PROGRAM-PROFESI-INSINYUR-FINAL-SALINAN.pdf>.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Program Profesi Insinyur”, diakses dari <http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/PERMEN-NOMOR-35-TAHUN-2016-TENTANG-PROGRAM-PROFESI-INSINYUR-FINAL-SALINAN.pdf>.

“Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran”, diakses dari <http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU11-2014Keinsinyuran.pdf>.

“Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi”, diakses dari http://rekrutmenlpjk.pu.go.id/_static/content/UU_1999_18.pdf.

Brosur

“Berdirinya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)”, dari brosur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

“Mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi”, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dari Brosur Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Sumber Lisan

Sumber lisan: Wawancara Langsung dengan Dr. Johannes Adhijoso Tjondro, (Dekan Teknik), pada tanggal 10 November 2016, pukul 09:20- 10:15.

Sumber lisan: Wawancara Langsung dengan Prof. Ir. Ade Sjafruddin, M.Sc., Ph.D., (Dekan Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung), pada tanggal 11 November 2016, pukul 16:25-17:05.

Sumber lisan: Wawancara Langsung dengan Wendy, (Pegawai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), pada tanggal 10 Oktober 2016, pukul 09:20 – 09:53.

Sumber lisan: Wawancara Langsung dengan Wendy, (Pegawai lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), pada tanggal 17 November 2016, pukul 10:03 – 10:34.